DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking*. *Boston: Houghton Mifflin*.

Azwar, A. (1996). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). *Making Health Policy*. Maidenhead: Open University Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge.

Donabedian, A. (1980). *The Definition of Quality and Approaches to Its Assessment*. Ann Arbor: Health Administration Press.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.

Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.

Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley & Sons.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Gani, A. (2014). *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. New York: McGraw-Hill.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Parsons, W. (2005). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Roberts, M., Hsiao, W., Berman, P., & Reich, M. (2004). *Getting Health Reform Right: A Guide to Improving Performance and Equity*. Oxford: Oxford University Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.

B. Jurnal dan Artikel

Andersen, R. M. (1995). Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care: Does It Matter? *Journal of Health and Social Behavior, 36*(1), 1–10.

Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). Editorial: The New Era of Mixed Methods. *Journal of Mixed Methods Research, 1*(1), 3–7.

Putri, S. S., Suryati, C., & Nandini, N. (2022). Pelaksanaan National Health Insurance pada Aspek Kepesertaan untuk Mencapai Universal Health Coverage. *Jurnal Sains dan Kesehatan*.

Arini, F. D., dkk. (2022). Ekuitas Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Mewujudkan Universal Health Coverage di Kecamatan Medan Baru. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*.

C. Dokumen Lembaga Internasional

World Health Organization. (2010). *Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage*. Geneva: World Health Organization.

D. Dokumen Pemerintah

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokumen ini merupakan Renstra Kemenkes yang berlaku dan menggantikan Renstra periode sebelumnya.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Profil Kesehatan Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Publikasi ini menyajikan gambaran pembangunan kesehatan nasional dan indikator kesehatan yang dapat digunakan sebagai rujukan kebijakan.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, beserta perubahan-perubahannya.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029.
Permenkes ini berstatus berlaku dan menetapkan arah strategis pembangunan kesehatan nasional periode 2025–2029.